



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT sehingga Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 dapat disusun dan terselesaikan dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan peraturan perundangan yang berlaku dengan tepat waktu. Dokumen Renstra Satpol PP disusun sebagai dokumen komitmen seluruh komponen di Satpol PP untuk berperan aktif dalam berpartisipasi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (trantibumlinmas) di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) yang kondusif, tentram, tertib dan damai.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bertitik tolak kepada orientansi pelayanan masyarakat mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan menggambarkan kekuatan, peluang dan rencana selama 5 tahun kedepan sekaligus melihat kendala yang dihadapi, serta memprediksi perkembangan dinamika masyarakat baik karena perkembangan teknologi informasi, integrasi ekonomi global serta kelancaran arus informasi untuk mendukung pembangunan masyarakat Kalimantan Barat kedepannya. Hal ini dilaksanakan dengan perencanaan strategis serta sinkronisasi program dan kegiatan baik di Pusat maupun di kabupaten/kota. Sehingga diharapkan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan gambaran secara jelas pelaksanaan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kalimantan Barat. Selain itu menjadi dasar untuk peningkatan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *Good Government*.

Pontianak, 26 September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,



SUHERMAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19701110 200212 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	1.1 Latar Belakang
	1
	1.2 Landasan Hukum
	3
	1.3 Maksud dan Tujuan
	5
	1.4 Sistematika Penulisan
	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	10
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	10
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	23
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
	28
	2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP Prov. Kalbar
	39
	2.5 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
	44
	2.6 Penentuan Isu Strategis
	45
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1. Tujuan, Sasaran, Stratedgi dan Arah Kebijakan
	46
BAB IV	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
	49
BAB V	PENUTUP
	66
	LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan Renstra pada RPJPD dan RPJMD
Gambar 2.1.2	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.2.1.2	Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tabel 2.2.1.3	Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 2.3.3	Evaluasi Hasil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 2.4	Rekapitulasi Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 3.1.1.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Terget Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan RPJMD
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Sasaran RPJM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

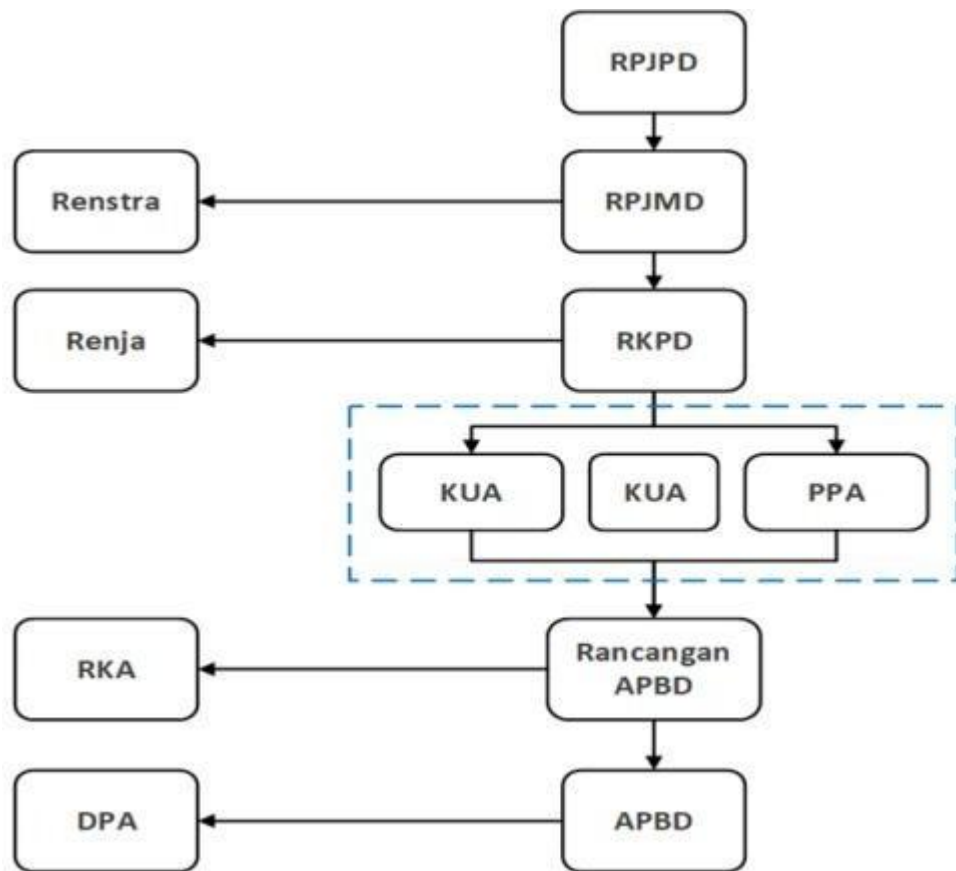
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan hasil rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Menjadi bagian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan menyusun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disebut Renstra-SKPD. Dokumen Renstra-SKPD merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Maka dengan ini mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang disusun untuk mewujudkan sasaran setiap organisasi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing - masing OPD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang terkait.

Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2020-2023 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2024– 2026 pada Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir sebagai pedoman keberlangsungan pembangunan dan kepastian pelaksanaan program pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyusunan Renstra yang baru untuk periode tahun 2025 – 2029. Adapun RPJMD periode 2025 - 2029 Provinsi Kalimantan Barat memiliki visi “Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut dijabarkan dalam 11 (sebelas) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Kalimantan Barat yang adil dan berkelanjutan
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dari desa hingga ke kota
3. Mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

4. Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, kompeten dengan prinsip *Good Governance dan Good Government*
5. Mewujudkan kesejahteraan tenaga pengajar dan tenaga pendidik
6. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan daerah serta mendukung perkembangan industri yang relevan sesuai dengan kearifan lokal
7. Mewujudkan masyarakat yang damai dan sejatera
8. Memberikan kepastian hukum dan penegakan Hak Asasi Manusi (HAM) serta keadilan dan kesejahteraan gender
9. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA)
10. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11. Meningkatkan partisipasi generasi muda dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat periode Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja selama periode waktu 2025 – 2029. Renstra ini disusun atas dasar pemahaman tentang lingkungan pada pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) di wilayah Kalimantan Barat dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada, dan kegiatannya bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja (Renja), sebagaimana terlihat dalam bagan alur berikut :



Gambar : 1.1. Kedudukan Renstra pada RPJPD dan RPJMD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Oleh karenanya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tentang struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan standar teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak

penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 pasal 3 yang meliputi :

- a. Standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Standar sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada

Standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan standar sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil / sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :

- a. pelayanan kerugian materil
- b. pelayanan pengobatan

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, terdiri atas : (1) rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan (2) rusak sedang dan / atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan / atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan. Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan / atau berat.

Mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah termuat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024–2026 hal ini guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 pelayanan minimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Renstra 2025 - 2029 saat ini.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang terkait proses penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi Kalbar Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 29).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Kalbar disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Satpol PP Provinsi Kalbar serta sebagai pedoman bagi Organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun;

1.3.2 Tujuan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perencanaan Strategis Periode 2025-2029 di susun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB 1- Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB 2- Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat data yang bersifat *given* dan evaluasi kinerja, serta menyajikan gambaran pelayanan perangkat daerah, isu strategis, potensi masalah lingkungan dan pontensi pelayanan perangkat daerah.

BAB 3- Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Bab ini memuat gambaran secara keseluruhan atau *cascading* dari tujuan perangkat daerah, strategis dan arah kebijakan perangkat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB 4- Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat prgram, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah dan proyeksi pendanaannya serta target kinerja pencapaian tujuan selama 5 tahun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB 5- Penutup

Bab ini memuat kesimpulan perencanaan jangka menengah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yang diuraikan berupa poin-poin secara garis besar.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Perda dan Perkada, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran sebagai lembaga yang menangani bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar mengenai ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

Dengan demikian Satpol PP merupakan lembaga Pemerintahan yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada untuk mewujudkan kondisi wilayah dan masyarakat yang tertib dan tentram.

Dengan kewenangan yang dimiliki Satpol PP tersebut sehingga menjadikan Satpol PP lembaga yang keberadaannya penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung Pembangunan Nasional secara merata khususnya pada Pemerintahan Daerah dengan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

2.1 Tugas Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Adapun tugas dan fungsi Satpol PP berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

- Kepala Satuan

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

- Sekretariat

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan Aset. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Satpol PP;

- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;.
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan SatpolPP; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dimaksud terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi mempunyai tugas mengumpul , mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, keuangan, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan satuan;
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian umum dan aparatur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang umum dan aparatur;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Umum dan Aparatur;
- d. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum dan Aparatur;

- e. Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang aparatur, organisasi, tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Subbag Umum dan Aparatur;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang di serahkan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Sub Bagian keuangan dan aset;
- d. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta memelihara peralatan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana keuangan dan aset;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan aset yang di serahkan oleh Sekretaris.

- Bidang Pembinaan Masyarakat

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang pembinaan masyarakat. Bidang Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyusunan program kerja di bidang pembinaan masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- d. Pengkoordinasian di bidang pembinaan masyarakat;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang- undangan;

- g. Penyelenggaraan urusan pemeritahan dibidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pembinaan Masyarakat;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap
- j. pelaksanaan tugas di bidang pembinaan masyarakat;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang- undangan.

Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelatihan dasar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kegiatan Seksi Kewaspadaaan Dini;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kewaspadaan Dini;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kewaspadaan dini;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, deteksi dan cegah dini penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan perundang- undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kewaspadaan dini yang diserahkan oleh Kepala Bidang

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis di fungsional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
 - d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bimbingan, pembinaan dan penyuluhan sesuai peraturan perundang- undangan;
 - e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang bimbingan, pembinaan dan penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- **Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman**
- Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pengendalian;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama;
- d. Pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan operasi, pengendalian dan kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. Melaksanakan tugas lain di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Satuan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksud terdiri dari :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Ketertiban Umum.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman.

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang operasional, pengendalian, patroli, pengamanan dan pengawalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang operasional dan pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan di Bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, penanganan unjuk rasa, dan kerusuhan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang ketertiban umum yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

- Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penegakan Perda dan Perkada, hubungan antar lembaga serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan administrasi di bidang penegakan Perda dan Perkada. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan Perda dan Perkada;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Perda dan Perkada;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;

- d. Pengkoordinasian dibidang penegakkan Perda dan Perkada, serta hubungan antar lembaga;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan perkada, serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang- undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan Perda dan Perkada, serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang penegakan Perda dan Perkada, serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan Perda dan Perkada, serta hubungan antar lembaga;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhdap pelaksanaan tugas di bidang penegakan Perda dan Perkada, serta hubungan antar lembaga; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang penegakan Perda dan Perkada, serta hubungan antar lembaga, sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Penegakan Perda dan Perkada terdiri dari :

- a. Seksi Penegakan;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Penegakan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang penegakan perda dan perkada serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penegakkan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Perda dan Perkada;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penegakan Perda dan Perkada ;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penegakan Perda dan Perkada sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan Perda dan Perkada;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan Perda dan Perkada;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan Perda dan Perkada; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penegakan Perda dan Perkada yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang Hubungan Antar Lembaga. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Hubungan Antar Lembaga;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Hubungan Antar Lembaga;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Hubungan Antar Lembaga;

- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Hubungan Antar Lembaga yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

- Bidang Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perlindungan Masyarakat oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang data dan informasi;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- d. Pengkoordinasian di bidang perlindungan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang- undangan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Potensi terdiri dari:

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang data dan informasi;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dibang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang data dan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

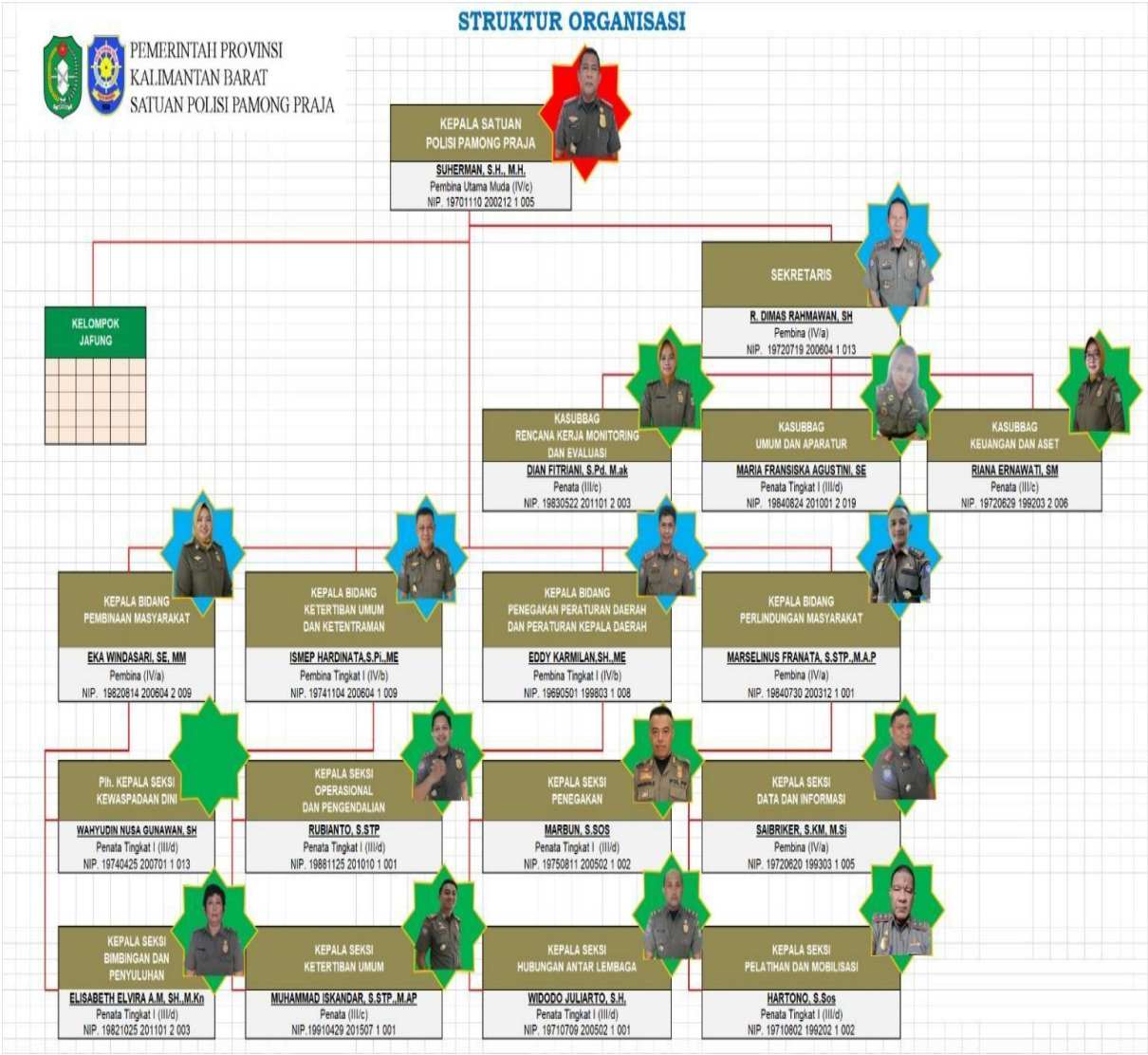
Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelatihan dan Mobilisasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelatihan dan mobilisasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan dan mobilisasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2.1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan perangkat daerah untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah. Pengelolaan Perangkat Daerah yang berkompeten dan handal tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber daya apartur yang dimiliki perangkat daerah selaku roda penggerak Pemerintahan. Untuk itu diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan keahlian yang diperlukan Perangkat Daerah khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 61 orang dan 35 orang Jabatan Fungsional, serta 32 tenaga banpol lapangan. Berikut jumlah Apartur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan :

- a. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.1.1
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (Orang)
1.	Laki-laki	85
2.	Perempuan	11
JUMLAH		96

Data per Desember 2024

b. Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.2.1.2

Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1.	Doktoral (S3)	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	11
3.	Sarjana (S1)	34
4.	Sarjana Muda (D3)	1
5.	SLTA atau sederajat	49
6.	SLTP atau sederajat	-
7.	SD atau sederajat	1
JUMLAH.....		96

Data per Desember 2024

c. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2.1.3

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOL.RUANG	JUMLAH
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
3.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
4.	Pembina (IV/a)	7
5.	Penata Tingkat I (III/d)	18
6.	Penata (III/c)	10
7.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	14
8.	Penata Muda (III/a)	27

Data per Desember 2024

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan urusan pemerintahan baik secara administrasi maupun lapangan adalah sebagai berikut :

1) Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak.

2) Kendaraan

Kendaraan yang tersedia untuk operasional yaitu :

- a) Kendaraan Bermotor Roda Dua = 13 unit
- b) Kendaraan Bermotor Roda Empat = 8 unit
- c) Kendaraan Bermotor Roda Enam = 2 unit

Jumlah kendaraan yang ada ini walaupun masih terbatas akan di manfaatkan seoptimal mungkin, dan apabila dimungkinkan tetap akan diusahakan penambahan secara bertahap.

3) Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Peralatan dan perlengkapan kerja perkantoran yang ada sudah cukup memadai, seperti Alat tulis, perangkat Komputer, Laptop, Sound Sistem, TV, Telepon, Faximili, Meja kursi kerja, perangkat meja kursi tamu, AC, Kipas Angin, Dispenser, Jam dinding, Lemari arsip, Feling Cabinet, Perda, Pergub dan buku-buku pedoman kerja lainnya, dan lain sebagainya.

Dalam rangka usaha mendukung pencapaian penyelenggaraan tugas dan fungsi penegakan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat serta pelaksanaan tugas lainnya, ada beberapa peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya seperti : Pos penjagaan, Pakaian dinas, Handy Talkie, Alat Kejut Listrik, tameng dan lain-lain. Hal ini sebagai upaya fasilitasi pelaksanaan kelancaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam implikasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat senantiasa mengupayakan dengan pendekatan preventif, humanis dan edukatif kepada masyarakat di Kalimantan Barat. Berikut ini adalah jenis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (ASN Satpol PP, PPNS dan Inteljen);
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Pelayanan Pengawalan dan Pengamanan Kepala Daerah, serta pejabat dan tamu negara;
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
7. Peningkatan pengamanan dan penertiban asset Pemda Pemrov Kalbar;
8. Peningkatan perlindungan masyarakat;
9. Peningkatan pembinaan pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada terhadap masyarakat.

Sebagai salah satu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, tentu sasaran / capaian target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dari capaian yang telah diperoleh dari realisasi target periode tahun 2024-2026 yang ditetapkan, sebagaimana tabel berikut ini :

Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN ke-	REALISASI CAPAIAN TAHUN ke-	RASIO CAPAIAN PADA TAHUN ke-
					2024	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
1	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%
2	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Tersedia	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%
4	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	100%
6	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
7	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
8	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
9	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
10	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN ke-	REALISASI CAPAIAN TAHUN ke-	RASIO CAPAIAN PADA TAHUN ke-
					2024	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
11	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
12	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
13	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
14	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda dan Perkada	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
15	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
16	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
17	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%

TABEL. 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN 2024	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN ke-	RATA-RATA PERTUMBUHAN	
				ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	3	4	5
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,288,170,300	2,250,504,749	98.35	457,634,060	450,100,950

Tabel 2.3.3.
EVALUASI HASIL RENSTRA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Data Capaian Awal 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Target Renstra 2024		Realisasi Capaian Renstra 2024		Rasio Capaian Renstra 2024	Unit Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketentraman dan ketertiban di Kalimantan Barat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Persentase pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Persentase penanganan perda dan perkara yang ditegakan 3. Persentase peningkatan pembinaan masyarakat 4. Persentase cakupan Satlinmas	100%		2,288,170,300				2,250,504,749		Satpol PP Provinsi
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pencegahan kejadian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam (satu) 1 daerah	100%		1,321,754,300				1,296,858,775		Satpol PP Provinsi
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			0 Dokumen	-			- 0 Dokumen	-		Satpol PP Provinsi
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		50 Orang	290,444,000			50 Orang	287,971,529		Satpol PP Provinsi

Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur		1 Dokumen	6,063,000			1 Dokumen	6,017,312		Satpol PP Provinsi
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia		15 Unit	31,065,600			15 Unit	30,822,500		Satpol PP Provinsi
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		4 Dokumen	358,984,300			4 Dokumen	358,490,851		Satpol PP Provinsi
Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada		1 Laporan	21,051,600			0 Laporan	-		Satpol PP Provinsi
Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Dokumen	63,846,300			1 Dokumen	63,777,146		Satpol PP Provinsi

Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		4 Laporan	522,068,300			4 Laporan	521,962,668		Satpol PP Provinsi
Peningkatan Kapasita SDMSatuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknistermasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja		0 Orang	-			0 Orang	-		Satpol PP Provinsi
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan PerkadaMelalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		4 Laporan	28,231,200			4 Laporan	27,816,769		Satpol PP Provinsi
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Perda/Perkada yang ditegakan	100%		834,866,700				824,656,330		Satpol PP Provinsi

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		1 Laporan	137,205,000			1 Laporan	134,328,247		Satpol PP Provinsi
Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		4 Laporan	356,862,000			4 Laporan	355,464,815		Satpol PP Provinsi
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP		4 Laporan	213,735,400			4 Laporan	212,527,714		Satpol PP Provinsi
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		1 Laporan	43,723,600			1 Laporan	43,103,781		Satpol PP Provinsi
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		0 Dokumen	-			0 Dokumen	-		Satpol PP Provinsi

Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		4 Laporan	42,728,000			4 Laporan	42,422,495		Satpol PP Provinsi
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		1 Dokumen	40,612,700			1 Dokumen	36,809,278		Satpol PP Provinsi
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase PPNS yang kompeten	100%		131,549,300				128,989,644		Satpol PP Provinsi
Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS		0 Dokumen	-			0 Dokumen	-		Satpol PP Provinsi
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		1 Dokumen	55,702,200			1 Dokumen	53,299,347		Satpol PP Provinsi

		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		4 Laporan	75,847,100			4 Laporan	75,690,297		Satpol PP Provin si
		Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		0 Laporan	-			0 Laporan	-		Satpol PP Provin si

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperankan oleh Satpol PP selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan masyarakat serta dinamika sosial yang terus berubah. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya maka Satpol PP Provinsi Kalbar menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. Luasnya wilayah cakupan wilayah Kalimantan Barat dengan tingkat kemajemukan penduduk yang heterogen (baik dari segi suku, agama, ras dan antar golongan/SARA);
2. Masih terbatasnya SDM untuk menghitung kebutuhan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) trantibumlinmas;
3. Masih minimnya dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan operasional trantibumlinmas;
4. Perlunya peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, PPNS dan Satlinmas dalam mewujudkan pelayanan Tibumtranmas.

Sedangkan peluang untuk mendukung Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Peraturan perundang - undangan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan ditetapkannya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengampu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan perangkat daerah yang termasuk pelaksana SPM;
2. Penambahan anggota Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yang relatif muda dan prima diharapkan memberikan dukungan yang positif untuk penerapan SPM trantibumlinmas;
3. Terjalannya koordinasi dan kerjasama lintas OPD dengan baik;
4. Terintegrasinya kegiatan SPM dalam dokumen perencanaan OPD dan Daerah.

2.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga ada rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk dapat beraktivitas dengan baik dan lancar setiap hari. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, yang harus disikapi secara serius dengan cara deteksi dini, cegah dini, pembinaan, penyuluhan serta pelaksanaan patroli secara rutin. Hal ini penting, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram maka pertumbuhan ekonomi akan lambat dan investasi akan sulit berkembang. Selain situasi dan kondisi perekonomian, bidang sosial, budaya, politik dan keamanan akan terancam dan tidak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik melalui kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum. Berikut permasalahan yang dan akan dihadapi pada tahun 2024-2026 dengan memperhatikan kondisi di lapangan:

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan Perda/Perkada yang ada;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tingginya beban operasional Satpol PP;
3. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap Perda/Perkada yang ada saat ini;
4. Terbatasnya kapasitas SDM anggota Satpol PP untuk menunjang pelaksanaan penegakan Perda/Perkada lebih optimal;
5. Stigma negatif masyarakat terhadap peran dan fungsi Satpol PP;
6. Minimnya Satlinmas yang aktif di Kalbar pelayanan trantibumlinmas.

Tabel 2.4
Berikut disajikan rekapitulasi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
Satpol PP Prov Kalbar

NO	JENIS TRANTIBUM YANG TELAH DITANGANI	JUMLAH PELAYANAN TRANTIBUM	SATUAN
1	PATROLI	21	kali
2	PENGAMANAN TEMPAT-TEMPAT PENTING, KEGIATAN, GEDUNG, ASET PEMERINTAH	227	kali
3	PENGAWALAN PEJABAT NEGARA	1	kali
4	SOSIALISASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	64	kali
5	CEGAH DINI DAN KEWASPADAAN DINI	162	kali
6	PENANGANAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA	25	kali
7	PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN PERDA DAN PERKADA	56	kali
	JUMLAH PELAYANAN TRANTIBUM YANG DITANGANI	556	kali

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) dilakukan dengan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum baik melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan, selain itu penindakan gangguan trantibum akibat unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat provinsi, kerjasama dengan antar lembaga dalam rangka cegah kejahatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP dan Satlinmas. Adapun Perda dan Perkada selama 3 (tiga) tahun (2024-2026) yang telah ditegakan antara lain:

- 1) Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang Di Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Peristiwa Mandor Sebagai hari berkabung Daerah dan Makam Juang Mandor Sebagai Monumen Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Perda Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak;
- 4) Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak;

- 5) Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- 6) Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak;
- 7) Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 8) Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pangan;
- 9) Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan;
- 10) Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat;
- 11) Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 12) Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 13) Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kehutanan;
- 14) Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 15) Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove;
- 16) Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal;
- 17) Perda Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
- 18) Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
- 19) Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043;
- 20) Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- 21) Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
- 22) Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- 23) Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- 24) Perda Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pramuwisata;
- 25) Perda Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;
- 26) Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 27) Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 28) Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat;
- 29) Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 30) Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan;
- 31) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat;
- 32) Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Selain dari pada itu telah dilaksanakan tugas lain dalam pelaksanaan penegakan huku terhadap peredaran atau distribusi rokok iilegal baik dari produsen ke konsumen tembakau dengan data pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun periode tahun 2023-2025 sebagai berikut:

- 1) Melakukan investigasi dan pengawasan peredaran rokok di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada 20 (Dua Puluh) orang pemilik usaha, terdiri dari 4 (empat) toko sembako, 9 (sembilan) warung kopi, 2 (dua) rumah makan dan 4 (empat) warung kelontong, serta 1 (satu) penjual pulsa disepanjang jalan Arteri Supadio;

- 3) Melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai diwilayah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan pada 28 (dua puluh delapan) pemilik usaha (Toko Kelontong, Warung Kopi, Warung) yang berada di sepanjang jalan raya Jongkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah;
- 5) Melakukan investigasi dan pengawasan peredaran rokok di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- 6) melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada 20 (dua puluh) pemilik usaha toko sembako, dan agen / distributor, Counter Rokok disepanjang jalan Panglima Aim. Tim menyampaikan kepada objek sosialisasi bahwa mengedarkan rokok ilegal merupakan bentuk pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai aturan yang berlaku, sehingga masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk menolak mengedarkan rokok illegal / Tanpa Cukai;
- 7) Melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai diwilayah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- 8) Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada 20 (dua puluh) pemilik usaha toko sembako, dan agen / distributor, Counter Rokok disepanjang jalan 28 Oktober Budi Utomo Kelurahan Siantan Hulu. Tim menyampaikan kepada objek sosialisasi bahwa mengedarkan rokok ilegal merupakan bentuk pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai aturan yang berlaku, sehingga masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk menolak mengedarkan rokok illegal / Tanpa Cukai;
- 9) Melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai diwilayah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- 10) Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada 20 (dua puluh) pemilik usaha toko sembako, dan agen / distributor, Counter Rokok disepanjang jalan Panglima Aim. Tim menyampaikan kepada objek sosialisasi bahwa mengedarkan rokok ilegal merupakan bentuk pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai aturan yang berlaku, sehingga masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk menolak mengedarkan rokok illegal / Tanpa Cukai;

Selain daripada itu telah dilakukan pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS telah dilakukan rapat koordinasi anggota PPNS selama 3 (tiga) tahun sebanyak 3 kali periode tahun 2021-2023 dengan diikuti 153 orang peserta yang terdiri 37 anggota PPNS aktif dari OPD Pemrov Kalbar dan 116 anggota Satpol PP kabupaten/kota, sebagai bentuk sarana untuk PPNS meningkatkan kapasitas peran dan fungsi PPNS yang sesuai standar.

2.5. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Sejalan dengan keberlangsungan pembangunan yang telah dirancang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan strategis bagi pencapaian sasaran pembangunan selama 5 tahun. Dalam rangka sinkronisasi capaian pembangunan perencanaan di daerah dengan Perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Barat maka disusun dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Renstra periode 2025-2029. Renstra merupakan pedoman dokumen yang menjadi pedoman perencanaan operasional trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada pengimplementasian pembangunan nasional peran tugas dan fungsi Satpol PP mendukung dalam pelaksanaan stabilitas polhukhankam dan transformasi publik di daerah dalam urusan trantibumlinmas di wilayah Kalimantan Barat. Maka untuk mengimplementasikan penyelenggaraan kebijakan pembangunan Nasional terhadap capaian perencanaan strategis kinerja Satpol PP Provinsi dilakukan upaya pelaksanaan implementasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi sebagai alat operasionalisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. Peningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada untuk mewujudkan masyarakat tertib dan tentram di wilayah Kalimantan Barat
3. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP yang memadai dan berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Keterpaduan dan konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan.

Secara umum telah adanya keselarasan antara sasaran dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari instansi Pusat dan dan Provinsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sehingga sasaran yang telah dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target pertahunnya bersinergi dengan program dan kegiatan Pusat dan Pemerintahan Provinsi oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

2.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dilakukan dengan pembahasan, koordinasi dan analisis dengan stakeholder dan aparatur di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalbar dengan metode *brainstroming* berdasarkan informasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah tertuang dalam perundangan yang telah ditetapkan. Berikut diuraikan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi bagian penting dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam taat Perda dan Perkada yang ada saat ini sehingga potensi terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada;
2. Masih terbatasnya upaya deteksi dini dan tindakan preventif sangat penting untuk menekan potensi gangguan Trantibum;
3. Minimnya Satlinmas yang aktif berperan dalam rangka pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteramaan Masyarakat (Tibumtranmas);
4. Masih minim dan terbatas peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan PPNS dalam pelayanan Perda/Perkada.

Berdasarkan isu strategis di atas dapat dirumuskan model pelayanan yang harus dilakukan Satpol PP sebagai upaya mewujudkan kondisi tenteram dan tertib dalam masyarakat Kalimantan Barat. Adapun *arah* pengembangan pelayanan yang menjadi titik fokus baik melalui interaksi sosial masyarakat secara langsung maupun melalui media elektronik ataupun media sosial menjadi alat untuk pelayanan trantibumlinmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga dengan upaya ini diharapkan dapat upaya perwujudan cipta kondisi aman, tentram dan tertib di wilayah Kalimantan Barat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur untuk menunjang tercapainya kinerja secara efektif dan efisien sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.1.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.1.1.1

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					
					($\%$)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	Indeks Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	Meningkatnya pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	Persentase penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	78.93	79.20	79.60	79.85	80	80.05

Sumber Data:Satpol PP Prov Kalbar

Pada tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Provinsi Kalbar secara umum tertuang pada dokumen renstra periode 2025-2029 terdiri dari satu tujuan yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Trantibumlinmas, dengan indikator tujuan *“Indeks penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)”* dengan sasaran ke-1 yaitu *“Meningkatnya pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)”*, yang diukur dengan indikator *“Presentase Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)”*, didukung dengan program prioritas Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan capaian outcome selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, meningkatnya kapasitas SDM PPNS.

Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat finalisasi Renstra periode tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH STRATEGI
Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	Meningkatnya pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang sinergi dan inklusif di Kalbar	Sinergitas berkesinambungan dalam berkoordinasi dengan pihak penegak hukum dan OPD lainnya dalam rangka penyelenggaraan trantibumlinmas
			Optimalisasi Peran dan peningkatan kapasitas anggota PPNS dalam rangka Penegakan Perda/Perkada di Kalimantan Barat
			Pemutahiran data dan informasi serta peningkatan kapasitas Satlinmas dalam rangka penyelenggaraan cakupan satlinmas di Kalbar
			Optimasilisasi penegakan Perda dan Perkada dengan sosialisasi, penyuluhan melalui pembinaan masyarakat yang berkelanjutan serta pemberian sanksi terhadap pelanggar Perda/Perkada
		Peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang	Kesiapsiagaan komunikatif dan persuasif dalam rangka pelayanan publik

		Berorientasi pada pemenuhan pelayanan publik pada Perangkat daerah	Penyelenggaraan kinerja pelayanan publik secara terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dalam Pelaksanaan
			Penyediaan dan kemudahan dalam memberikan informasi pelayanan publik baik secara intenal maupun eksternal
			Penyelenggaraan pengawasan internal secara berkala pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan pelayanan publik

BAB IV

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan RPJMD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					
					(%)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	Indeks Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	Meningkatnya pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	Persentase penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	78.93	79.20	79.60	79.85	80	80.05

Sumber: data diolah Satpol PP Prov Kalbar

Untuk mengukur capaian kinerja indeks trantibumlinmas pada tabel 4.1 digunakan kriteria rentang nilai yang termuat dalam peraturan Kepmendagri No. 100.4.3.669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, yang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel Kriteria Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	
Rentang Nilai	Kategori
0.00-20.00	Buruk
20.01-40.00	Kurang Baik
40.01-60.00	Cukup Baik
60.01-80.00	Baik
80.01-100	Sangat Baik

Tabel 4.2
Indikator Tujuan Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	Indeks Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	78.93	79.20	79.60	79.85	80	80.05

Tabel 4.3
Indikator Tujuan Sasaran Perangkat Daerah
Yang Mengacu Sasaran RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA (%)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	Persentase penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)	100	100	100	100	100	100

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA PELAYANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERSENTASE PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
				1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Sakip													
					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	NILAI SAKIP	80.60	81.50	24.920.400.870,00	81.90	25.150.500.000,00	82.30	26.800.250.000,00	82.40	27.350.000.000,00	82.60	28.700.850.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
				1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	14.000.000,00	2	16.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	9.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	5	5	10.000.000,00	5	12.000.000,00	5	14.000.000,00	5	16.000.000,00	5	18.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	44.000.000,00	4	45.000.000,00	4	48.000.000,00	4	50.000.000,00	4	52.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	21.000.000,00	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	29.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1	32.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun												1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan												1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0013 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Dampu														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terkordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Dampu		Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Dampu												1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
				1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3	13	20.619.732.258,00	13	20.624.732.258,00	13	20.629.732.258,00	13	20.634.732.258,00	13	20.639.732.258,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	13	252.080.000,00	13	257.080.000,00	13	262.080.000,00	13	272.080.000,00	13	282.080.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	13	13.358.400,00	13	18.358.400,00	0	22.358.400,00	13	27.358.400,00	13	33.358.400,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	13	8.415.800,00	13	9.257.800,00	13	10.180.000,00	13	11.200.000,00	13	12.450.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	12.584.500,00	12	13.845.000,00	12	15.230.000,00	12	16.750.000,00	12	18.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	13	7.033.000,00	13	7.750.000,00	13	8.550.000,00	13	9.360.000,00	13	10.300.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
				1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian															
				1.05.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	166	16.600.000,00	166	18.000.000,00	166	20.000.000,00	166	22.000.000,00	166	24.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	1	295.000.000,00	1	300.000.000,00	1	310.000.000,00	1	320.000.000,00	1	330.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang MengikutPendidkan dan Pelatihan												1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah														1.05.0.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah															
				1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	8.000.000,00	1	8.500.000,00	1	9.000.000,00	1	9.500.000,00	1	10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	46.000.000,00	1	48.000.000,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	57.000.000,00	1	59.000.000,00	1	63.000.000,00	1	65.000.000,00	1	68.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	530.000.000,00	1	540.000.000,00	1	650.000.000,00	1	760.000.000,00	1	850.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	32.000.000,00	1	35.000.000,00	1	38.000.000,00	1	41.000.000,00	1	44.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.000.000,00	1	17.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	330.000.000,00	1	360.000.000,00	1	490.000.000,00	1	520.000.000,00	1	650.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	38.000.000,00	1	41.000.000,00	1	45.000.000,00	1	49.000.000,00	1	53.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	31.000.000,00	1	34.000.000,00	1	37.000.000,00	1	40.000.000,00	1	44.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Penambahan Kebutuhan Barang Milik Daerah															
				1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	480.000.000,00	1	485.000.000,00	1	510.000.000,00	1	515.000.000,00	1	520.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2	929.531.273,00	2	974.184.361,00	4	2.115.279.561,00	4	2.275.279.561,00	6	3.160.819.561,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	1	90.000.000,00	1	98.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	5	13.500.000,00	6	14.700.000,00	7	15.600.000,00	8	16.500.000,00	9	17.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	4	17.800.000,00	5	22.500.000,00	6	26.000.000,00	7	32.000.000,00	8	34.200.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	10.000.000,00	2	12.500.000,00	2	14.000.000,00	2	15.600.000,00	2	16.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1	180.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	185.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	240.000.000,00	1	260.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan															
				1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	2	100.000.000,00	2	130.000.000,00	2	160.000.000,00	2	190.000.000,00	2	220.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertzinannya	24	25	374.765.639,00	26	369.092.181,00	27	450.239.781,00	28	533.639.781,00	29	613.409.781,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	26	42.000.000,00	28	46.000.000,00	30	50.000.000,00	32	54.000.000,00	34	58.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
				Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	1. Meningkatkan kapasitas PPNS yang berkompeten	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100	1.000.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.400.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Presentase PPNS yang kompeten															
				1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terbentuknya Sekretariat PPNS		Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	0	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	162.000.000,00	1	215.000.000,00	1	218.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1	1	330.000.000,00	1	335.000.000,00	1	368.000.000,00	1	395.000.000,00	1	400.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0	1	220.000.000,00	1	297.500.000,00	1	350.000.000,00	1	360.000.000,00	1	375.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	0	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00	8	276.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada yang ditegakan 2. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan masyarakat	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100	100	1.900.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.200.000.000,00		2.300.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Persentase Perda dan Perkada yang dilegalkan															
				1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4	4	599.000.000,00	4	651.000.000,00	4	656.000.000,00	4	661.000.000,00	4	676.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	115.000.000,00	1	178.000.000,00	1	229.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	0	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4	4	195.000.000,00	4	200.000.000,00	4	205.000.000,00	4	210.000.000,00	4	215.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1	1	136.000.000,00	1	138.000.000,00	1	140.000.000,00	1	143.000.000,00	1	145.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	4	4	300.000.000,00	4	303.000.000,00	4	324.000.000,00	4	325.000.000,00	4	330.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	1	10.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	4	4	370.000.000,00	4	375.000.000,00	4	380.000.000,00	4	385.000.000,00	4	390.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Istumen Penegakan Perda dan Perkada		Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	0	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Sarana dan PrasaranaPenegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	5	80.000.000,00	5	90.000.000,00	5	95.000.000,00	5	100.000.000,00	5	105.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya penyelenggaraan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100	100	2.000.000.000,00	100	2.050.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.150.000.000,00	100	2.200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum															
				1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	17.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4	4	607.000.000,00	4	610.000.000,00	4	612.000.000,00	4	615.000.000,00	4	620.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada		Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	30.000.000,00	1	32.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4	4	200.000.000,00	4	205.000.000,00	4	210.000.000,00	4	215.000.000,00	4	215.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4	4	1.010.000.000,00	4	1.056.500.000,00	4	1.107.000.000,00	4	1.160.000.000,00	4	1.173.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah		Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	0	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0025 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal		Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	0	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	19.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0026 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tertakutnya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum		Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0028 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Keterliban Umum														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Keterliban Umum		Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Keterliban Umum	0	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Keterliban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterliban Umum, dan perlindungan masyarakat		Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Keterliban Umum yang Tersedia	0	4	90.000.000,00	4	70.000.000,00	3	50.000.000,00	2	27.500.000,00	3	50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan cakupan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100	100	950.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.150.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan keterliban umum															
				1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1	1	15.000.000,00	1	15.500.000,00	1	16.000.000,00	1	16.500.000,00	1	17.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	4	4	323.000.000,00	4	350.000.000,00	4	373.000.000,00	4	390.000.000,00	4	400.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	50	50	135.000.000,00	50	147.500.000,00	50	164.000.000,00	50	188.500.000,00	50	221.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	50	477.000.000,00	50	487.000.000,00	50	497.000.000,00	50	505.000.000,00	50	512.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dokumen perencanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun. Menjadi acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan penentuan target capaian kinerja dan pagu inidkatif yang tersedia. Sebagai pedoman Perangkat Daerah khususnya Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan trantibumlinmas sebagai bentuk kontribusi pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini jg memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan melalui program dan kegiatan yang telah tertuang ini. Namun demikian keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga ditentukan adanya peran kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen aparatur Satpol PP Provinsi Kalbar untuk memberikan pelayanan trantibumlinmas yang optimal kepada masyarakat. Sehingga untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029 diperlukan evaluasi setiap tahunnya untuk memastikan capaian outcame dapat tercapai sesuai yang telah ditentukan dalam dokumen Renstra. Maka Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Satpol PP Provinsi termasuk indikator-indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Satpol PP Provinsi Kalbar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Demikianlah dengan tersusunnya Renstra Periode 2025-2029 diharapkan kinerja Satpol PP Provinsi Kalbar dapat berjalan dengan optimal dan akuntabel serta dapat berorientasi pada pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 26 September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat




SUHERMAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701110 200212 1 005

LAMPIRAN

CASCADING SATPOL PP PROV KALBAR PERIODE 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	Es III (PK)	Indikator Es III	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	MENINGKATKAN PELAYANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERSENTASE PENYELENGGAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
				1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Sakip													
			1 Ess III Sekretaris		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	NILAI SAKIP	80.60	81.50	24.920.400.870,00	81.90	25.150.500.000,00	82.30	26.800.250.000,00	82.40	27.350.000.000,00	82.60	28.700.850.000,00	1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
				1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	14.000.000.00	2	16.000.000.00	2	18.000.000.00	2	20.000.000.00	2	22.000.000.00	1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	9.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	10.000.000,00	5	12.000.000,00	5	14.000.000,00	5	16.000.000,00	5	18.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	44.000.000,00	4	45.000.000,00	4	48.000.000,00	4	50.000.000,00	4	52.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	21.000.000,00	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	29.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1	32.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun												1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan												1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.01.0013 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu		Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu												1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
				1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3	13	20.619.732.258,00	13	20.624.732.258,00	13	20.629.732.258,00	13	20.634.732.258,00	13	20.639.732.258,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	13	252.080.000,00	13	257.080.000,00	13	262.080.000,00	13	272.080.000,00	13	282.080.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	13	13.358.400,00	13	18.358.400,00	0	22.358.400,00	13	27.358.400,00	13	33.358.400,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	13	8.415.800,00	13	9.257.800,00	13	10.180.000,00	13	11.200.000,00	13	12.450.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	12.584.500,00	12	13.845.000,00	12	15.230.000,00	12	16.750.000,00	12	18.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	13	7.033.000,00	13	7.750.000,00	13	8.550.000,00	13	9.360.000,00	13	10.300.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
				1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI	

																		KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														1.05.0.00.0.00.01 .00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian															
				1.05.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	166	16.600.000,00	166	18.000.000,00	166	20.000.000,00	166	22.000.000,00	166	24.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	1	295.000.000,00	1	300.000.000,00	1	310.000.000,00	1	320.000.000,00	1	330.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI	

[illegible]

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	8.000.000,00	1	8.500.000,00	1	9.000.000,00	1	9.500.000,00	1	10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	46.000.000,00	1	48.000.000,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	57.000.000,00	1	59.000.000,00	1	63.000.000,00	1	65.000.000,00	1	68.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor														1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	530.000.000,00	1	540.000.000,00	1	650.000.000,00	1	760.000.000,00	1	850.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														1.05.0.00.0.00.01.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

																		KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	32.000.000,00	1	35.000.000,00	1	38.000.000,00	1	41.000.000,00	1	44.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.000.000,00	1	17.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	330.000.000,00	1	360.000.000,00	1	490.000.000,00	1	520.000.000,00	1	650.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	38.000.000,00	1	41.000.000,00	1	45.000.000,00	1	49.000.000,00	1	53.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	31.000.000,00	1	34.000.000,00	1	37.000.000,00	1	40.000.000,00	1	44.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Penambahan Kebutuhan Barang Milik Daerah															
				1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	480.000.000,00	1	485.000.000,00	1	510.000.000,00	1	515.000.000,00	1	520.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2	929.531.273,00	2	974.184.361,00	4	2.115.279.561,00	4	2.275.279.561,00	6	3.160.819.561,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	1	90.000.000,00	1	98.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	5	13.500.000,00	6	14.700.000,00	7	15.600.000,00	8	16.500.000,00	9	17.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

				1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	4	17.800.000,00	5	22.500.000,00	6	26.000.000,00	7	32.000.000,00	8	34.200.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	10.000.000,00	2	12.500.000,00	2	14.000.000,00	2	15.600.000,00	2	16.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1	180.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	185.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	240.000.000,00	1	260.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan															
				1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	2	100.000.000,00	2	130.000.000,00	2	160.000.000,00	2	190.000.000,00	2	220.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	25	374.765.639,00	26	369.092.181,00	27	450.239.781,00	28	533.639.781,00	29	613.409.781,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	26	42.000.000,00	28	46.000.000,00	30	50.000.000,00	32	54.000.000,00	34	58.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
			1 Es III Bidang PDPKPD	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	1. Meningkatnya kapasitas PPNS yang berkompeten	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100	1.000.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.400.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Presentase PPNS yang kompeten															

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terbentuknya Sekretariat PPNS		Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	0	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	162.000.000,00	1	215.000.000,00	1	218.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1	1	330.000.000,00	1	335.000.000,00	1	368.000.000,00	1	395.000.000,00	1	400.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0	1	220.000.000,00	1	297.500.000,00	1	350.000.000,00	1	360.000.000,00	1	375.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

				Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	0	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00	8	276.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
			2 Es III Bidang :1 PPDKPD 2. Binmas	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada yang ditegakan 2. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan masyarakat	Persentase Penegakan Perda dan Perkada (P dan B)	100	100	1.900.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.200.000.000,00		2.300.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan															
				1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4	4	599.000.000,00	4	651.000.000,00	4	656.000.000,00	4	661.000.000,00	4	676.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	115.000.000,00	1	178.000.000,00	1	229.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	0	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4	4	195.000.000,00	4	200.000.000,00	4	205.000.000,00	4	210.000.000,00	4	215.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1	1	136.000.000,00	1	138.000.000,00	1	140.000.000,00	1	143.000.000,00	1	145.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	4	4	300.000.000,00	4	303.000.000,00	4	324.000.000,00	4	325.000.000,00	4	330.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	1	10.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														1.05.0.00.0.00.01.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

				Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	4	4	370.000.000,00	4	375.000.000,00	4	380.000.000,00	4	385.000.000,00	4	390.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada		Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	0	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	5	80.000.000,00	5	90.000.000,00	5	95.000.000,00	5	100.000.000,00	5	105.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
			3 Es III Bidang KUK	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya penyelenggaraan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (K dan B)	100	100	2.000.000.000,00	100	2.050.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.150.000.000,00	100	2.200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum															
				1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	17.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4	4	607.000.000,00	4	610.000.000,00	4	612.000.000,00	4	615.000.000,00	4	620.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada		Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	30.000.000,00	1	32.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	4	4	200.000.000,00	4	205.000.000,00	4	210.000.000,00	4	215.000.000,00	4	215.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

				Massa		Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan													
				1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan													1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4	4	1.010.000.000,00	4	1.056.500.000,00	4	1.107.000.000,00	4	1.160.000.000,00	4	1.173.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah		Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	0	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0025 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal		Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	0	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	19.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0026 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0028 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan Trantibum														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat		Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0	4	90.000.000,00	4	70.000.000,00	3	50.000.000,00	2	27.500.000,00	3	50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

			4 Es III (Linmas)	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan cakupan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100	100	950.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.150.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum															
				1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1	1	15.000.000,00	1	15.500.000,00	1	16.000.000,00	1	16.500.000,00	1	17.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	4	4	323.000.000,00	4	350.000.000,00	4	373.000.000,00	4	390.000.000,00	4	400.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	50	50	135.000.000,00	50	147.500.000,00	50	164.000.000,00	50	188.500.000,00	50	221.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	50	477.000.000,00	50	487.000.000,00	50	497.000.000,00	50	505.000.000,00	50	512.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

Pontianak, 26 September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat



Suherman, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701110 200212 1 005

